

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN HUKUM BAGI KONSUMEN
(Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DEMITRY SEPTYAN KISMADANA
NIM. 115010100111131**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)**

Identitas :

a. Nama : Demitry Septyan Kismadana
b. NIM : 115010100111131

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 19830502 200812 1 003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19530121 197903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN HUKUM BAGI KONSUMEN
(Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan)

DEMITRY SEPTYAN KISMADANA
NIM: 115010100111131

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan majelis penguji pada tanggal 21
September 2015 dan disahkan pada tanggal _____

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 19830502 200812 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19530121 197903 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Maret 2018

Demitry Septyan Kismadana
NIM. 115010100111131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa puji syukur yang setiap saat dipanjatkan oleh penulis atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Judul : “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pembelaan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)”. Selama penelitian, penulis menyelesaikan skripsi ini di PDIH Fakulta Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari bantuan baik dalam hal materi maupun moril dari berbagai pihak serta doa para orang-orang lingkungan sekitar penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T. berkat rahmat dan hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Mama dan Papa yang tak hentinya memberikan suport berupa materi, kesabaran serta doa kedua orang tua penulis yang membakar semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan selesai tepat waktu.
3. Ketiga adik laki laki penulis, yang selalu memberi semangat dan bantuannya untuk menyelesaikan skripsi penulis tepat waktu.
4. Prof. Dr. Ir. Bisri, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya
5. Dr. Rachmad Syafa’at selaku Dekan Fakultas Hukum
6. Dr. Budi Santoso, S.H. LLM. Selaku Kabag Bagian Perdata
7. Kedua dosen pembimbing yakni pembimbing utama bapak Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S. dan bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua.
8. Bapak M. Zairul Alam selaku dosen Pembimbing Akademik semasa kuliah di fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Teman teman dekat yang selalu iseng dan memprovokasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni: Dito, Dita, Fatih, Harits, Wafi, Bima, Patandung, marvey, dan kang Lutfy.
10. Teman teman Organisasi BEM FH UB dari tahun 2011 s/d 2013
11. Teman-teman FKPH yang selalu memberi masukan kepada penulis
12. Teman-teman Perbis yang saling suport ke sesame
13. Para angkatan senior penulis karena dalam proses penulisan tak luput dari masukan para senior
14. Para angkatan junior atas bantuan mereka
15. Sosok gebetan yang selalu memotivasi penulis terima kasih Affrida.

16. Serta para teman teman kelas E lainnya yang memberi kesan baik pada saat kegiatan belajar mengajar ataupun berdiskusi selama melakukan perkuliahan di fakultas Hukum Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis membuka kesempatan seluas luasnya kepada semua pihak yang membaca untuk memberi masukan, kritik dan gagasannya untuk menyempurnakan kembali skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dan mohon dimaafkan sebesar-besarnya jika selama proses pembelajaran ini hingga ditulisnya skripsi ini, terdapat kesalahan dari penulis kepada sanak saudara sekalian baik itu berupa lisan maupun tindakan dengan disengaja maupun tidak.

Semoga Allah S.W.T selalu mengampuni seluruh kesalahan kita serta membimbing kita di jalan yang di ridhoi-Nya.

Malang, Maret 2018

Demitry S. Kismadana

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Ringkasan	ix
Summary	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Ojk	15
1. Filosofi Dan Asas-Asas Lembaga Ojk	16
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	19
3. Tujuan	21
4. Fungsi.....	22
5. Tugas	22
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	24
D. Tinjauan Umum Metode Pengawasan	26
1. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	27
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	29
2. Arbitrase	32

BAB III

METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F. Sistematika Penulisan	42
G. Definisi Konseptual.....	43

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pola Pembelaan Hukum Yang Digunakan Lembaga Bentukan Ojk Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Nasabah Lembaga Keuangan) Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Ojk	44
B. Gambaran Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat	48
C. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase	51
D. Pola Uu Ojk Dengan Uu Pk Dalam Lingkup Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat	54
E. Kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	59
1. Norma	60
2. Waktu Belaku Peraturan Ojk	61
3. Ruang Lingkup Peraturan Ojk	62
4. Hak Konsumen Dalam Keterbukaan Informasi Produk	62
5. Perlindungan Konsumen Atas Hak Perjanjian Yang Adil (<i>Fair Agreement</i>)	64
6. Pengaturan Tentang Kompensasi Atas Kerugian Konsumen Paska Transaksi	65
F. Konstruksi Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Pembelaan Hukum Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Dari Prespektif Otoritas Jasa Keuangan Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011	66

BAB V

PEUTUP	74
1. Kesimpulan	74
2. Saran	76

LAMPIRAN**DAFTAR PUSTAKA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu	9
--	---

RINGKASAN

Demitry Septyan Kismadana, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan), Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S. dan Dr. Reka Dewantara, S.H., M.Si.

Perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga otoritas di ranah jasa keuangan sebagai upaya lanjutan dari pengaduan yang dilayangkan konsumen. Karena para konsumen yang dalam hal ini merupakan investor merasa dirugikan secara materiil, karena kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dinilai tidak sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan atau diiklankan sejak awal.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan prinsip yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memiliki berbagai tugas, fungsi, wewenang dan tujuan khususnya pada sektor jasa keuangan, salah satunya perlindungan konsumen dan masyarakat. Sebelumnya Perlindungan konsumen dan Masyarakat telah diundangkan secara terpisah, yakni undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang sekaligus sebagai dasar hukum berdirinya lembaga OJK memiliki keterkaitan antara UU PK dengan UU OJK yang sifatnya saling melengkapi karena tidak semua yang terkandung dalam UU PK mengakomodir kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan. Keterkaitan antara UU PK dengan UU OJK juga merupakan bentuk implementasi hukum dari pasal 4 angka 9 UU PK tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang lain diluar UU PK. Tentu, ini merupakan modal yang besar dalam pelaksanaan “Pembelaan Hukum” oleh OJK sebagai salah satu upaya OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.

Karena, dalam setiap sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sangat jarang sekali dapat memuaskan pihak konsumen bila dilakukan secara mandiri antara pihak pelaku usaha dengan konsumen melalui cara pengaduan atau *complaint*. Seolah posisi konsumen dalam hal ini sangat lemah sehingga tidak jarang pula para pelaku usaha menanggapi dengan ala kadarnya. Padahal dalam UU OJK dalam bab Perlindungan konsumen sudah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan diperjelas dalam POJK No 01/07/2013 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Namun saya pribadi menilai upaya tersebut belum maksimal Karena penulis rasa masih belum ada jaminan bagi konsumen untuk memperoleh hak-hak yang telah dilanggar oleh pelaku usaha jasa keuangan.

SUMMARY

Demitry Septyan Kismadana, Economic and Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, March 2018, IN THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY THE AUTHORITY TO DEFEND THE LAW FOR CONSUMERS. (Study of Article 30 Paragraph (1) of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority) Dr. Bambang Winarno,S.H.,M.S. dan Dr. Reka Dewantara,S.H.,M.Si.

Legal pleading by “Otoritas Jasa Keuangan” as by the Financial Services Authority, which is an institution of authority in the realm of financial services as a continuation of the complaints filed by consumers. Because consumers who in this case is an investor feels disadvantaged materially, due to the activities undertaken by financial services businesses judged not according to what is already offered or advertised since the beginning.

Financial Services Authority as an institution set up under the principles derived from Pancasila and the opening Act of 1945 has a variety of tasks, functions, powers and objectives, especially in the financial services sector, one of which is the protection of consumers and society. Previous consumer protection and the Community have enacted separately, namely Law No. 8 of 1999 on consumer protection. While in law number 21 tahun2011 the same time as the legal basis for the establishment of the FSA institutions have linkages between UU UU PK with the FSA that are complementary because not all contained in the Act PK accommodate the needs of consumers in the financial services sector. The linkage between the UU PK FSA is also a form of legal implementation of article 4 of Law number 9 PK on consumer rights set out in legislation other than PK Act. Of course, this is a large capital in the implementation of the "Legal Pleading" by the FSA as part of efforts FSA in consumer protection and public sector financial services.

Because, in any disputes involving businesses and consumers are very rarely able to satisfy the consumer when done independently between the businesses with consumers by way of complaint or complaint. So as the consumer's position in this case is so weak that not infrequently businesses respond to perfunctory. Whereas the FSA Act chapter Consumer Protection described the rights and obligations of each party, and clarified in POJK No. 01 / .07 / 2013 on the protection of consumers and society. But I personally judge these efforts have not been up For authors think there is still no guarantee for consumers to obtain the rights that have been violated by financial services businesses.